

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra AdtyaBakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Amrulah, 1998, *Urgensi Perpu Kepailitan*, Jakarta: Suara Pembaruan.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Aria Suryadi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Binawan, Andang L. dan A. Prasetyantoko, 2004, *Keadilan Sosial : Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Ichtiar
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 2004, Jakarta: Delta Pamungkas.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- H.M.N. Purwosujipto, 2004, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Djambatan.

- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Semarang: Sinergi Offset.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet. III, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Media Publishing.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Outra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- Logemann, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Marzuki^Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.
- Otto, Jan Michael, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moelino*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, 2012, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa.
- Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, Cet. 3, Malang: UMM Press.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Syamsudin M., 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cet. 1, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W.J.S. Poerwasunata, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amanda Maylaksita, 2019, “Problematisasi Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1.
- Faiz, Pan Mohamad, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1.
- N.G. Yudara, 1996, “Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya”, Makalah Diskusi Panel UUHT, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sari, Yeni Eka dan Zulfikar Judge, 2021, “Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Sby)”, diakses pada 30 Juli 2024, dari https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21306-5_0770.pdf.
- Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Suhardo, Etty S., 2008, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

The Law Dictionary, diakses pada 20 Juni 2024, dari <http://thelawdictionary.org/mark/>

Yuanita Harahap, “Analisis Hukum mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang Kepailitan”, Tesis, Program Magister Hukum USU, Sumatera Utara

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Tambahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris